

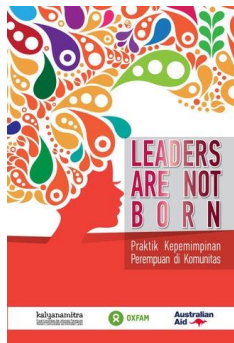
Resensi Buku

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENUJU KESETARAAN GENDER

Audra Jovani

Universitas Kristen Indonesia

audra.jovani@uki.ac.id



Judul : Leader Are Not Born: Praktik Kepemimpinan Perempuan di Komunitas
Penulis : Hegel Terome, Ika Agustina, Listyowati, Rena Herdiyani, Puansari Siregar,
Fr. Yohana TW
Jumlah Hal. : x + 196 halaman
Penerbit : Yayasan Kalyanamitra
Cetakan 1 : Juni 2015

Abstract

This article provides a review of the book published by Yayasan Kalyanamitra, authored by Hegel Terome, Ika Agustina, Listyowati, Rena Herdiyani, Puansari Siregar, and Fr. Yohana TW, titled *Leaders Are Not Born: Praktik Kepemimpinan Perempuan di Komunitas*. The motivation behind this book arises from the observation that development in Indonesia has not yet resulted in significant changes to establish an equitable and just social order for both women and men. Women continue to face gender inequality in the planning, implementation, and utilization of development outcomes. This is evident in the marginalization and discrimination they experience in accessing public power, engaging with development initiatives, and managing resources.

Keywords: Leadership, Women, Politics, Gender Equality.

Abstrak

Artikel ini mengulas buku yang diterbitkan oleh Yayasan Kalyanamitra, yang ditulis oleh Hegel Terome, Ika Agustina, Listyowati, Rena Herdiyani, Puansari Siregar, dan Fr. Yohana TW, berjudul *Leaders Are Not Born: Praktik Kepemimpinan Perempuan di Komunitas*. Latar belakang penulisan buku ini berasal dari kenyataan bahwa perkembangan di Indonesia belum membawa perubahan signifikan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan masih mengalami ketidaksetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Hal ini terlihat dari marginalisasi dan diskriminasi yang dialami perempuan dalam mengisi posisi kekuasaan publik, mengakses pembangunan, dan mengelola sumber daya.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Politik, Kesetaraan Gender.

Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem politik, termasuk peningkatan kesadaran pentingnya kesetaraan gender. Meskipun demikian, perempuan masih terpinggirkan dalam pengambilan keputusan politik. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang menduduki posisi politik, seperti anggota legislatif dan kepala daerah, angka tersebut masih jauh dari ideal. Hal ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam politik.

Mengapa kepemimpinan perempuan di politik sangat penting? Selain untuk mencapai kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perempuan membawa perspektif dan pengalaman yang berbeda, yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan perempuan dalam politik, tentunya tercipta kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan anak.

Dalam konteks ini, tentunya terdapat buku-buku dan penelitian yang mengangkat tema kepemimpinan perempuan di politik, salah satunya *Leaders Are Not Born: Praktik*

Kepemimpinan Perempuan di Komunitas. Buku ini tidak hanya mendokumentasikan perjalanan dan pencapaian perempuan dalam politik, tetapi juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Keberagaman latar belakang perempuan pemimpin mulai dari bidang kerja, pengalaman politik, faktor eksternal yang dihadapi serta bagaimana perempuan pemimpin mencoba mengatasi dan mencari solusi atas persoalan dalam kepemimpinan serta mampu bertahan di tengah kepemimpinannya.

Tulisan dalam buku ini juga mengangkat profil pemimpin dan praktik kepemimpinan perempuan antara lain: Irma Suryani Chaniago dan Miryam S. Haryani (Anggota DPR RI), Agustin Poliana (Anggota DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur), Fitri Nora (Anggota DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat), Sahat Farida Berlian (Anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat), Susiana S (Anggota DPRD Kota Bengkulu Tengah, Bengkulu), Nining S. Saranani (Anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara), Badingah (Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta), dan Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan, Bali). Sembilan perempuan ini merupakan contoh perempuan pemimpin di lembaga legislatif dan kepala daerah. Dengan pengalaman yang dimiliki, mereka melalui proses menjadi pemimpin dengan latar belakang yang berbeda dan praktik kepemimpinan yang berlainan. Cita-cita sebagai pemimpin tumbuh dalam perjalanan hidup karena banyak bersentuhan dengan masyarakat yang dekat dengan ketertinggalan, kemiskinan dan ketimpangan yang dialami oleh perempuan di masyarakat. Hal inilah yang mendorong mereka masuk dunia politik untuk memperjuangkan nasib perempuan.

Melalui buku ini, pembaca akan mendapatkan gambaran terkait dengan kepemimpinan perempuan, termasuk contoh kepemimpinan perempuan. Satu per satu profil pemimpin perempuan ini akan dijelaskan detail sehingga pembaca dapat memahami mulai dari biodata singkat, pengalaman berpolitik, dukungan partai politik,

persiapan menjadi pemimpin, praktik kepemimpinannya baik di DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Daerah, serta tantangan yang dihadapinya.

Arti Penting Kepemimpinan Perempuan

Pada bab pendahuluan, dijelaskan makna pemimpin dan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kepemimpinan perempuan dan demokrasi, kepemimpinan perempuan di Indonesia, praktik kepemimpinan perempuan di Indonesia. Keberadaan perempuan pada posisi penentu kebijakan sangat penting dan harus ditingkatkan kuantitasnya, ini berangkat dari realitas bahwa di Indonesia, jumlah pemilih perempuan cukup besar, namun kebutuhan praktis dan strategis sering kali bukan menjadi prioritas dalam pembangunan. Selanjutnya permasalahan ini diangkat dalam pertanyaan kritis yaitu apakah ketika perempuan berada pada posisi strategis tersebut dapat menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan di Indonesia? Kemudian, bagaimana praktik kepemimpinan perempuan mampu membawa perubahan sosial yang lebih baik bagi perempuan dan masyarakat?

Kalyanamitra dalam riset-riset yang dilakukan terkait dengan strategi pemenangan perempuan dalam pemilu 2014 menemukan bahwa tidak semua perempuan menjadi anggota DPR RI dan DPRD mengerti kebutuhan praktis dan kepentingan strategis perempuan (kebutuhan praktis: sandang, pangan, papan pendidikan, dsb. Kepentingan strategis: hak asasi, kebebasan, otonomi, seksualitas, kesetaraan dan keadilan). Dan pada saat yang bersamaan, perempuan harus berbicara dan bertindak atas nama partai politik, yang memang realitasnya budaya patriarklah sangat dominan di partai politik. hal ini menjadi tantangan berat perempuan yang duduk di parlemen untuk menempatkan prioritas perjuangannya, mendahulukan kepentingan perempuan atau kepentingan partainya.

Posisi strategis perempuan dalam partai politik ini menjadi kunci tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik yang memang penting dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Keith Grint dalam studinya mengatakan terdapat empat bentuk makna pemimpin atau kepemimpinan yaitu: kepemimpinan sebagai posisi, kepemimpinan sebagai *person*, kepemimpinan sebagai hasil dan kepemimpinan sebagai proses (Grint, 2010). Dari sini kita dapat melihat bahwa kepemimpinan memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang.

Oleh karena itu, pemimpin ialah orang yang menginspirasi orang lain untuk mengikutinya dan mengarahkan mereka meraih tujuan bersama. Pemimpin meletakkan visi masa depan dan membangun strategi. Pemimpin mampu mengambil keputusan yang sulit, pemimpin harus melakukan hal besar "*doing the right thing*" (Pardey, 2007). Selanjutnya Pardey mengungkapkan terdapat tiga jenis pemimpin jika dikaitkan dengan tindakannya yaitu: pemimpin yang berpusat pada aksi, pemimpin yang melayani, dan pemimpin yang cerdas emosional. Salah satu pemimpin cerdas emosional adalah R.A Kartini, yang mampu mendorong orang lain mengikutinya (cerdas-emosional), dan mampu menginspirasi orang lain untuk mengikuti gagasan dan perbuatannya (Pardey, 2007).

Secara fenomenal, gaya kepemimpinan perempuan sangatlah khas. Peran tradisional perempuan sebagai yang melahirkan dan merawat generasi masa depan umat manusia telah membentuk sifat-sifat alami untuk berperan "memberdayakan" dan "bekerja sama" dalam kepemimpinan perempuan. perempuan karena tidak memiliki kekuasaan politik, maka potensi dan gaya kepemimpinan perempuan terabaikan dalam sejarah. Oleh karenanya, dalam alam demokrasi, kekuasaan politis perempuan penting untuk diperjuangkan dengan alasan: Pertama, dalam rangka legitimasi sistem demokrasi, maka seluruh warga negara harus terwakilkan. Kedua, bila di suatu negeri mayoritas penduduknya perempuan dan dipimpin oleh laki-laki maka bisa dimengerti

bahwa banyak kualitas kepemimpinan belum ditemukan. Ketiga, perempuan dapat membawa pengalaman dan keterampilan kepemimpinan yang tidak dimiliki laki-laki di masyarakat, kantor dan organisasi (Solheim, 2000).

Perempuan juga tidak memiliki kekuasaan politis secara tradisional diungkapkan oleh Hans J. Morgenthau, bahwa "kekuasaan sebagai kendali laki-laki terhadap pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan orang lain". kekuasaan politis adalah kesanggupan melakukan, kemampuan bertindak, kekuatan paksaan, komando, otoritas dan daya pengaruh. Kekuasaan bersifat netral, ini bukan baik ataupun buruk. Karakter kekuasaan dimengerti sedemikian maskulin dengan konotasi psikoseksual yaitu pemaksaan, kekerasan dan otoriter (Solheim, 2000). Penggunaan kekuasaan oleh perempuan dipandang bersifat "ilegal". Karakter feminin dijauhkan dari dunia kekuasaan-masyarakat merumuskan kekuasaan sebagai "dunia laki-laki". Oleh karenanya perempuan kebanyakan tidak merasa nyaman memakai definisi kekuasaan yang bias laki-laki. Namun demikian, istilah "pemberdayaan" (*empowering*) bagi perempuan lebih luwes maknanya untuk dieksplorasi sebagai sumber daya yang diproduksi dan dibagikan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kekuasaan menjadi energi yang mengubah baik pemimpinnya maupun yang dipimpin. Pemimpin yang efektif ini mampu memberdayakan orang lain berdasarkan kepentingan mereka. Tentu saja konsep kekuasaan ini lahir sebagai kritik feminisme terhadap model kekuasaan yang bias dan dominan laki-laki.

Yang menarik dalam buku ini, kekuasaan dalam konteks perdamaian memungkinkan tampilnya cara berpikir "peng-ibuan" di kalangan pemimpin laki-laki. Peran tradisional perempuan dalam merawat dan mengasuh anak-anak dalam benih perdamaian melahirkan tokoh-tokoh perdamaian dunia seperti M. Gandhi, Martin Luther King, dsb. Para Feminis percaya bahwa faktor pola asuh, perawatan dan pendidikan yang membentuk karakter "tanpa kekerasan" (*non violence*). Di sisi lain,

kepemimpinan perempuan yang berhadapan dengan kekuasaan publik yang sejarahnya lebih banyak di tangan laki-laki menciptakan legitimasi maskulin melalui dominasi terhadap perempuan. Hal ini berdampak perempuan yang menjadi pemimpin cenderung bertindak seperti laki-laki. Tentu saja ini dilatarbelakangi bahwa kekuasaan publik (politik) berkembang menjadi identik dengan kekuasaan laki-laki baik di pemerintahan ataupun kepemimpinan. Selain itu, menurut Apfelbaum dan Hadley terdapat lima jalur menuju kepemimpinan yang berlaku untuk perempuan dan laki-laki meskipun terdapat perbedaan gender. Lima jalur tersebut adalah: kharisma, pewarisan, pencapaian karya profesional, seleksi dan penghargaan (Helms, 2012).

Di Indonesia, sejarah mencatat bahwa perempuan pemimpin telah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara. Kemajuan politik perempuan Indonesia juga terlihat pada isu hak perempuan, penghapusan poligami, pendidikan, ekonomi, kewarganegaraan dan sebagainya. R.A Kartini di Rembang, Rohana Kudus di Padang merupakan dua contoh dari kemajuan perempuan pada masanya. Selanjutnya pada masa Orde Baru, walaupun secara kuantitas tidak sebanding dengan jumlah laki-laki di DPR RI maupun DPRD, namun walaupun sedikit terdapat kebijakan yang menolong perempuan, seperti UU Perkawinan 1974, UU Modal Asing, dan lainnya.

Di Era Reformasi 1998, sistem pemilu dari tidak langsung dan tertutup menjadi sistem langsung dan semi-terbuka sampai terbuka telah menciptakan ruang politik yang besar bagi perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan ini merupakan dampak global era demokratisasi dunia yang menekankan pada kebebasan individu, otonomi diri, hak asasi dan pasar bebas (Amerika Serikat). Indonesia sejak Dekade Perempuan Internasional (1975-1985), Kongres Perempuan Mexico (1975), Pertemuan Copenhagen (1980), Nairobi (1985) dan Beijing (1995) menjadi pendorong posisi perempuan dalam pembangunan. Pencapaian ini lebih banyak terjadi di pendidikan, ekonomi dan profesional, tidak dialami perempuan di bidang politik. Namun demikian,

terdapat hubungan positif antara capaian pendidikan perempuan yang lebih tinggi dengan kepemimpinan dan posisi pengambil kebijakan baik di sektor publik maupun privat. Akses yang setara dalam bidang ekonomi dan pendidikan menjadi prakondisi bagi pemajuan status sosio-ekonomis perempuan dan penguatan politiknya (Sbaity, 2013).

Lebih lanjut, di Indonesia banyak perempuan terdidik dengan kesadaran sendiri atau dorongan orang lain atau keadaan masuk ke partai politik. Selain itu, partai politik pun secara pragmatis mencalonkan atau merekrut perempuan dari luar partai menjadi caleg di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kepala daerah (gubernur, walikota, bupati), hal ini mendorong banyak perempuan untuk tampil di ranah publik dan berkompetisi dengan laki-laki (Kalyanamitra, 2015).

Praktik Kepemimpinan Politik Perempuan

Pada bab kedua dan ketiga, pembaca akan melihat praktik kepemimpinan politik perempuan di DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan perempuan sebagai kepala daerah. Adapun perempuan tersebut adalah Irma Suryani Chaniago dan Miryam S. Haryani (Anggota DPR RI), Agustin Poliana (Anggota DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur), Fitri Nora (Anggota DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat), Sahat Farida Berlian (Anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat), Susiana S (Anggota DPRD Kota Bengkulu Tengah, Bengkulu), Nining S. Saranani (Anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara), Badingah (Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta), dan Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan, Bali). Terdapat dua hal penting yang didokumentasikan mengenai praktik kepemimpinan perempuan yaitu: proses menjadi pemimpin, dan modalitas yang mendukung.

Proses menjadi pemimpin. Sembilan perempuan pemimpin ini merupakan contoh pemimpin perempuan di lembaga legislatif dan sebagai kepala daerah. Dengan

pengalaman yang beragam, mereka telah melalui proses yang berbeda untuk menjadi pemimpin, masing-masing dengan latar belakang dan praktik kepemimpinan yang unik. Cita-cita mereka sebagai pemimpin tumbuh dalam perjalanan hidup, yang banyak dipengaruhi oleh interaksi dengan masyarakat yang menghadapi ketertinggalan, kemiskinan, dan ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Hal ini mendorong mereka untuk terjun ke dunia politik demi memperjuangkan nasib perempuan.

Modalitas yang mendukung. Untuk menjadi pemimpin, kesembilan perempuan ini memerlukan persiapan dan kesiapan diri. Perempuan memerlukan modal sosial, ekonomi, budaya dan politik. Modal sosial telah dibangun jauh sebelum perempuan terjun di dunia politik, terbentuk karena implementasi kerja-kerja mereka di lapangan masyarakat. Modal sosial ini dapat berupa kelas sosial, jaringan sosial, dan dukungan masyarakat. Perempuan harus bekerja keras dan kerja cerdas untuk membangun relasi sosial yang solid untuk memenangkan hati masyarakat (konstituen) di dapil bahkan mempertahankan apresiasi masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.

Selanjutnya adalah modal politik, perempuan membangun jaringan politik dengan terlibat dengan partai politik, masuk partai politik menjadi anggota, kader maupun caleg dalam rangka memenuhi kuota 30 persen perempuan di parlemen. Latar belakang masuk politik pun dengan alasan yang beragam seperti, tertarik pada visi dan misi partai politik, partai politik merupakan kendaraan kekuasaan yang legitim dan legal. Di samping itu, perempuan ini telah memiliki pengalaman organisasi yang panjang sehingga dengan pengalaman organisasi ini memudahkan perempuan maju sebagai anggota dewan maupun kepala daerah.

Modal berikutnya adalah modal ekonomi. Perempuan harus menyiapkan dana untuk kampanye, sosialisasi, rapat, dan sebagainya. Besarnya biaya ini kadang-kadang menyurutkan perempuan maju ke arena pileg maupun pilkada. Namun perempuan melakukan strategi tertentu untuk mengatasi minimnya dana yaitu dengan mendorong

keluarga, teman, kolega, pihak lain untuk menyiapkan bukan uang tunai melainkan alat atau sarana kampanye, tempat, dan fasilitas lainnya.

Penutup

Buku ini menunjukkan bahwa pemimpin memang tidak dilahirkan (*leader are not born*), tetapi pemimpin itu lahir dari proses panjang dan bahkan penuh dengan perjuangan. Hal ini juga berlaku bagi perempuan pemimpin, perjuangan perempuan terlihat dari proaktifnya turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat. Dengan mendengarkan keluhan ini, perempuan pemimpin juga turut “merasakan” dan akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh perempuan dan masyarakat lainnya.

Buku ini sangat relevan bagi perempuan lain yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat melalui kepemimpinannya. Melalui analisisnya yang komprehensif, buku ini tidak hanya mengupas pentingnya kepemimpinan perempuan di bidang politik tetapi juga memberikan wawasan tentang pentingnya dukungan masyarakat untuk mendukung perempuan sebagai pemimpin. Bagi para akademisi, aktivis, perempuan politisi dan pembuat kebijakan, buku ini menjadi sumber penting untuk memahami rumitnya tantangan perempuan dalam politik, mulai dari proses menjadi pemimpin (pengalaman, keinginan, dukungan), modal (sosial, politik, ekonomi), harapan untuk terwujudnya kesetaraan gender.

Terakhir, buku ini juga mengingatkan kita bahwa kehadiran perempuan dalam politik sebagai pemimpin tidak hanya tanggung jawab perempuan itu sendiri, tetapi juga negara dan masyarakat. Kisah keberhasilan sembilan perempuan pemimpin menjadi bukti bahwa proses menjadi pemimpin telah membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat (perempuan dan laki-laki). Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama

dalam memastikan bahwa suara perempuan di dengar dan hak-hak perempuan dihormati.

Buku ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilakukan oleh penulis terkait dengan kehadiran dan peran aktif perempuan dalam politik. Penulis telah mengeksplorasi isu penting yang dialami oleh perempuan pemimpin, bagaimana proses panjang menjadi pemimpin sampai dengan modalitas-modalitas yang mendukung perempuan. Buku ini merupakan satu bukti dan rekaman penting mengenai pentingnya perempuan sebagai pemimpin untuk menuju kesetaraan gender yang sejati.

Daftar Pustaka

- Grint, K. (2010). *Leadership: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Helms, ,. L. (2012). *Comparative Political Leadership*. New York: Palgrave McMillan Ltd.
- Kalyanamitra. (2015). *It's a Politics: Rekam Jejak Pengalaman Perempuan ndalam Pemilu 2014*. Jakarta: Kalyanamitra.
- Pardey, D. (2007). *Introducing Leadership*. UK: Elsevier Ltd.
- Sbaity, K. F. (2013). *Party Politics, Religion, and Women's Leadership: Lebanon in Comparative Perspective*. New York: Palgrave McMillan Ltd.
- Solheim, O. B. (2000). *On Top of the World: Women's Political Leadership in Scandinavia and Beyond*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.